



BUPATI GUNUNG MAS

Kuala Kurun, Maret 2018

Nomor	: 050/	/BP3D/III/2018	Yth.	Kepada
Sifat	: Amat Segera			Kepala Perangkat Daerah di Lingkup
Lampiran	: -			Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
Perihal	: Penyusunan Rancangan Awal		Di -	
	Rencana Kerja Perangkat			Tempat
	Daerah Tahun Anggaran 2019			

Sehubungan Penyusunan Rancangan awal RKPD Tahun 2019 dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam pasal 78 bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD harus mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, maka diharapkan masing-masing Perangkat Daerah untuk segera menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mengingat Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut akan dibahas bersama dalam Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Maret Tahun 2018.

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 tersebut supaya memperhatikan pagu indikatif Tahun 2019 yang telah ditetapkan untuk masing-masing Perangkat Daerah;
2. Khusus untuk Perangkat Daerah yang menerima Pagu Indikatif Kewilayahan, supaya bisa mencantumkan dalam program/kegiatan Perangkat Daerah-nya sesuai dengan hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2018;
3. Menyelaraskan program/kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten dengan program/kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dalam rangka oprimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
4. Mempertajam indikator serta target kinerja program/kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan target pada Perencanaan Pembangunan di RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019;
5. Sebagai langkah awal, Perangkat Daerah dapat melakukan dahulu entry data pada Aplikasi Sistem Perencanaan Renja Perangkat Daerah;

6. Diminta bagian perencanaan pada Perangkat Daerah agar dapat melakukan entry data selambat-lambatnya tanggal **16 Maret 2018**, bahan entry berupa softcopi agar disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Up. Bidang Perencanaan dan Penganggaran atau melalui email bp3d.gunungmas@gmail.com.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI GUNUNG MAS,

ARTON S. DOHONG

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
2. Arsip

Tabel 5.1.
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

**VISI : “LANJUTKAN DAN MANTAPKAN PEMBANGUNAN MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN GUNUNG MAS YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERMARTABAT”
(GUNUNG MAS BERSINAR 2019)**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1. Meningkatkan kualitas, relevansi dan akses perangkat pendidikan dan layanan kesehatan.	1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, inovatif, berdaya saing dan sejahtera	1. Meningkatnya aksesabilitas dan mutu pendidikan	- Angka Melek Huruf - Rata-rata lama sekolah - Angka Harapan Lama Sekolah
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	- Angka Gizi Buruk - Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Bayi - Angka Kesakitan
2. Meningkatkan pemberdayaan dan daya saing ekonomi rakyat.	1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, inovatif, berdaya saing dan sejahtera	1. Meningkatkan ketahanan pangan	- Ketersediaan pangan utama (%)
		2. Meningkatkan pendapatan masyarakat	- Jumlah pendapatan perkapita/tahun - Jumlah PDRB perkapita/tahun - Angka kemiskinan - Angka pengangguran
		3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	- % PDRB sektor pertanian
		4. Meningkatkan PDRB sub sektor perikanan	- % PDRB sub sektor perikanan

		5. Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM	- % koperasi yang modal dan SHU meningkat
			- % UMKM yang modal dan omzet meningkat
		6. Meningkatnya pendapatan masyarakat	- Jumlah pendapatan perkapita/tahun
		7. Meningkatnya sektor industri	- PDRB sektor industri
		8. Meningkatnya sektor perdagangan	- PDRB sektor perdagangan
3. Melanjutkan dan memantapkan pembangunan infrastruktur dasar pembuka isolasi daerah secara adil dan proporsional.	1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar.	1. Meningkatnya kapasitas infrastruktur	- Ratio jalan dalam kondisi baik - Ratio jembatan dalam kondisi baik - Ratio saluran irigasi yang berfungsi optimal
	2. meningkatnya infrastruktur jalan ke desa	1. Meningkatnya konektivitas	- jumlah desa yang terhubung dengan kecamatan
	3. Meningkatnya infrastruktur akses komunikasi	1. Meningkatnya layanan konektivitas komunikasi	- % desa yang tersambung dengan jaringan telekomunikasi
		2. Meningkatnya keselamatan lalu lintas	- Presentase penurunan angka/jumlah kecelakaan lalu lintas - PDRB sektor pariwisata
		4. Meningkatnya sektor pariwisata	

4. Meningkatkan layanan pemerintahan secara lebih berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel, pada semua tingkatan pemerintahan	1. Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan bebas KKN	1. Meningkatnya pelaksanaan RB	- Nilai RB
		2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	- Nilai saki
		3. Opini BPK terhadap laporan keuangan	- Opini BPK
		4. Meningkatnya kapabilitas APIP	- Level kapabilitas
		5. Meningkatnya maturitas SPIP	- Level maturitas
		6. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	- IKM
	2. Terselenggaranya tahapan kebijakan perencanaan yang konsisten melalui mekanisme musrenbang yaitu mulai dari musrenbang Desa / Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten	1. Tersusunnya Dokumen RPJMD, RKPD dan RTRD tata ruang daerah yang berkualitas, terpadu dan tepat waktu	- Jumlah Dokumen Perencanaan
	3. Meningkatnya akses layanan dan penataan administrasi pertanahan	1. Meningkatnya pengusulan penerbitan sertifikat tanah milik pemerintah daerah tepat waktu 2. Tertatanya pengelolaan administrasi pertanahan	- Jumlah pengusulan sertifikat milik pemerintah daerah per tahun - Jumlah sertifikat yang diterbitkan pertahun bagi masyarakat miskin tepat waktu



		bagi masyarakat miskin	
		3. Meningkatnya prosedur administrasi pembebasan tanah	- % pembebasan tanah yang diselesaikan tepat waktu
5. Meningkatkan ketersediaan energi untuk rakyat.	1. Meningkatnya kelestarian hidup lingkungan hidup	1. Menurunnya pencemaran lingkungan	- % perusahaan / wajib usaha yang menerapkan aturan penanganan limbah
		2. Terpenuhinya baku mutu kualitas air, tanah dan udara	- % standar baku mutu udara
6. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, melalui penguatan keterkaitan dan relevansi antara pengembangan perangkat pendidikan dengan investasi daerah.	1. Meningkatkan tenaga kerja terampil.	1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	- Jumlah pemuda berprestasi
		2. Meningkatnya prestasi olah raga	- Jumlah medali
	2. Meningkatnya perempuan yang aktif pada pembangunan	1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.	- Indek Pemberdayaan Gender (IDG)
		2. Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak	- Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar
	3. Meningkatnya keamanan lingkungan	1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat	- Angka kriminal - Jumlah konflik yang diselesaikan



			- Tingkat pelanggaran terhadap Perda
	4. Meningkatnya jumlah investasi daerah	1. Meningkatnya investasi	- Jumlah investor PMDN dan PMA - Nilai investasi daerah
		2. Meningkatnya Jumlah perizinandan non perizinan yang terlayani	- Persentase pengajuan perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu
		3. meningkatnya tenaga kerja bergelar S-2 dan S-3	- Jumlah tenaga kerja S2 dan S3
7. Meningkatkan pengendalian, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam secara serasi, seimbang dan lestari.	1. Meningkatkan aksesibilitas lingkungan sesuai tata ruang	1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan dasar	- % jumlah desa yang dialiri air bersih
	2. Terjaganya pelestarian taman Hutan Raya (TAHURA) Lapak Jaru untuk suaka flora dan fauna di kabupaten Gunung Mas	2. Tertata dan terjaganya kelestarian kawasan Tahura Lapak Jaru	- Luas kawasan Tahura yang tertata dan terjaga kelestariannya

Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 pada RPJMD 2014-2019 yang harus diaplikasikan pada Program Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2019 :

1. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial;
2. Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. Penaataan dan peningkatan iklim Investasi;
4. Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang;
6. Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
7. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
8. Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi; dan
9. Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah.
10. Program pembangunan sarana air bersih dan sanitasi